

EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh :
Siti Zuchainah¹⁾



ational food security is one of the main pillars supporting economic resilience and sustainable national resilience. Food self-sufficiency at the household level need attention, because the household food self-sufficiency is the foundation of food self-sufficiency and national territory. Food security policy aimed to achieve food self-sufficiency, ensure food availability and consumption of adequate, safe, quality, and nutritional balanced at the household level, regional, national and evenly over time through the utilization of local resources. One of the government is intervention in achieving food security is through the Program of Action Village Independent Food with facilitation assistance / counseling, business assistance and funding the program Strengthening Business Capital Group. This program is an activity that directly reach the poor in food-insecure areas.

This study aimed to determine the effectiveness of the Program Desa Mandiri Pangan Action in handling food insecurity incidents in Bantul and determine the factors that can increase the effectiveness of the program implementation. The effectiveness of the program is measured using output and outcome indicators. Indicators of output is based on the achievement of the target program which has been determined by the Food Security Department of Agriculture. While outcome indicator is based on increased welfare (physical) and the progress of human capacity through the development indicated a positive mindset (nonphysical).

Research method used was a descriptive qualitative approach to reveal information relating to the program output and outcome. The Program Desa Mandiri Pangan Action of Bantul District conducted in two villages namely food insecurity in district of Dlingo Muntuk Village and Selopamioro Village Imogiri sub district. Site selection is based on the existence of the research program as a pilot project handling food insecurity in the region of Yogyakarta Special Region. The data used to support this research is the observation in the field, in-depth interviews, questionnaires and documents related to the research.

The results showed that the Program Desa Mandiri Pangan Action held in Bantul regency is effective because the analysis based on output indicators in accordance with specified targets. At outcome indicators has been progress and improvement of living level mindset target communities. The Program Desa Mandiri Pangan managed to increase the level of living and positive thinking people, but yet can effectively reduce food insecurity poverty. These conditions due to differences in the basic capacity (endowment factor), community participation and target communities.

1. Siti Zuchainah, SE.,MAP, adalah Kasubid Pengendalian di Bidang Pengendalian Program Bappeda Kabupaten Bantul, alumni Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia yang harus dipenuhi untuk melanjutkan kehidupannya. Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan (Aswatini. Dkk, 2004 : 27) mengartikan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan secara nasional (Badan Ketahanan Pangan, 2007:1) pada saat ini belum dapat diwujudkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya kejadian rawan pangan di berbagai daerah di tanah air yang bersifat kronis (terjadi berulang sepanjang waktu) dan transien (terjadi secara mendadak).

Melihat kenyataan berbagai permasalahan ketahanan pangan, maka penanganan rawan pangan menjadi salah satu prioritas penting. Salah satu program penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan adalah kegiatan program Aksi Desa Mandiri Pangan. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya.

Kabupaten Bantul merupakan satu-satunya Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kali mendapat kepercayaan dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian untuk melaksanakan program Desa Mandiri Pangan. Alokasi anggaran akan diberikan selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2006. Keberadaan program

dinyatakan sebagai *trigger mechanism* (Nainggolan, 2008 : 135) dalam penanganan rawan pangan dan diharapkan dapat diaplikasikan pada daerah lain.

1.2. Rumusan Masalah

- a. *Bagaimana Efektifitas Implementasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul?*
- b. *Faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan efektifitas Implementasi Program tersebut?*

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dalam rangka penanganan rawan pangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penanganan rawan pangan.

1.5. Hipotesis

- a. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul efektif meningkatkan status ketahanan pangan

masyarakat Desa Muntuk Kecamatan Dlingo dan Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri.

- b. Peranan *Stakeholder* merupakan faktor yang harus ada, sedangkan kapasitas dasar dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang dapat meningkatkan efektifitas program.

2.1. Efektifitas Kebijakan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara (Simatupang, 2007 : 1), menjamin akses pangan yang cukup bagi semua penduduk (FAO, 1996 dalam Aswatini, 2004: 43), dan membentuk sumberdaya manusia berkualitas (World Bank, 2005: 1). Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan (RPPK, 2005 : 33). Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk mampu menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu (Badan Ketahanan Pangan Deptan, 2006:8).

Kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menggariskan pokok-pokok kebijakan diantaranya mengembangkan aliansi solidaritas masyarakat mengatasi masyarakat mengatasi kerawanan pangan.

Salah satu program untuk mengatasi kerawanan pangan adalah, Program Aksi Desa Mandiri Pangan. *Desa Mandiri Pangan* (Badan Ketahanan Pangan Deptan, 2006:7) adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Kebijakan publik dibuat dapat dipastikan untuk memecahkan persoalan kehidupan masyarakat banyak (Walker dalam Widodo, 2001:198; Anderson dalam Winarno, 2005: 16), berkaitan dengan unit pemerintahan (Eyestone dalam Winarno, 2005: 15), dan apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dye dalam Subarsono, 2006:2), dalam tiga proses yakni formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan dan proses evaluasi kebijakan publik (Wahab, 2005:13).

Penelitian ini mencoba mengevaluasi kebijakan publik dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan yang telah ditentukan (Darwin, 1996: 59), atau melihat efektifitas kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*), tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan (Wibawa, 1994: 9).

Secara demikian penelitian ini melihat efektifitas program atau kebijakan (Casley dan Kumar, 1991: 2) dengan menggunakan *formal evaluation* (Dunn, 2003: 613-614), atau meminjam istilah Ripley (1985:144) sebagai

"formative evaluation is similar to process evaluation" dengan deskripsi formative evaluation sebagai:

"process evaluation compares the manner in which a program is operated and the product it produces against the plan for the program...it test whether the plan is being carried out as written, on the basis that the plan must be followed in order to have success"

Efektifitas kebijakan juga bisa dilihat dari *outcome* yang diinginkan (Osborne dan Gaebler, 1996 : 395), atau membandingkan antara hasil dengan rencana program Ripley (1985:144).

Dengan demikian, konsep efektifitas dalam penelitian evaluasi implementasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ini adalah :

1. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila hasil pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan sasaran dengan cara membandingkan antara prestasi dengan rencana resmi program yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Efektifitas adalah ketepatan hasil dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti bila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan yang direncanakan, maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif.

Efektifitas *output* program tersebut dapat diukur dengan cara membandingkan capaian hasil dan indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Apabila kegiatan sosialisasi, pelatihan masyarakat, pen-

dampingan, penumbuhan kelembagaan dan penerimaan bantuan telah mencapai target, tepat sasaran dan sesuai dengan pedoman umum program, maka program tersebut dikatakan efektif (Badan Ketahanan Pangan, 2006:51).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan status ketahanan pangan masyarakat meliputi peningkatan *livelihood* (fisik) dan *mindset* (non-fisik) masyarakat sasaran (Badan Ketahanan Pangan, 2007: 2). Evaluasi kemajuan status dan posisi ketahanan pangan yang dicapai oleh peserta dan penerima manfaat program Desa Mandiri Pangan pada prinsipnya diukur dari beberapa indikator kemajuan. Indikator ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. indikator kemajuan tingkat kehidupan (*livelihood*), dan
2. indikator kemajuan pola pikir (*mindset*).

Pemilihan dua indikator ini pada prinsipnya juga didasarkan oleh kenyataan bahwa komponen Program Desa Mandiri Pangan tidak hanya berfokus pada kegiatan pemberdayaan fisik tetapi juga meliputi kegiatan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2007:2).

Apabila program dapat memberikan kemajuan pada tingkat penghidupan dan kemajuan pola pikir masyarakat sasaran, maka program dikatakan efektif. Dengan demikian maka efektifitas program Aksi Desa Mandiri Pangan diukur dengan cara membandingkan antara prestasi dengan rencana

resmi program yang sudah ditetapkan sebelumnya baik *output* maupun *outcome*.

2.2. Faktor-faktor yang Mendukung Efektifitas Program

Keberhasilan pelaksanaan/implementasi suatu program pemerintah sangat ditentukan oleh berbagai faktor (Subarsono, 2006:89), antara lain komitmen para *policy makers*, dukungan sistem anggaran pemerintah, keterlibatan *stakeholder* (Keban, 2008:86) dan sejauhmana sumberdaya dan personil disediakan oleh sistem kebijakan memiliki jumlah dan kualitas yang memadai (Wibawa, 1994:41).

Peranan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan/program sangatlah menentukan keberhasilan program tersebut. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat penting pada implementasi (Edward III dalam Winarno 2005:126), dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait sangat menentukan keberhasilan suatu program (Meter dan Horn, dalam Subarsono, 2006:100). Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja (Edward dalam Winarno, 2005: 151), yang tercermin pada pembagian kewenangan dalam melaksanakan suatu program.

Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan kebijakan/program adalah faktor sumberdaya. Sumberdaya kebijakan tidak kalah penting dengan standar dan tujuan (Meter dan Horn dalam Wibawa 1994:

20), sedangkan sumberdaya yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan adalah dana (Edward III dalam Subarsono 2006: 91), dan sumberdaya manusia yang melaksanakan kebijakan itu sendiri serta fasilitas untuk melaksanakan kebijakan (Widodo. 2001: 202).

Menurut pendapat-pendapat diatas, struktur birokrasi pelaksana program yang tercermin dengan adanya pembagian tugas dan wewenang, komunikasi dan koordinasi serta sumberdaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan program merupakan komponen yang tercakup dalam faktor peranan *stakeholder*. Peranan *stakeholder* ini merupakan faktor yang harus ada untuk mendukung keberhasilan program.

Alokasi berbagai komponen yang tercakup dalam faktor peranan *stakeholder* tidak dapat memberikan hasil yang sama pada kelompok-kelompok sasaran program. Menurut teori Weimer dan Vining (Subarsono, 2006: 103), suatu kebijakan atau program dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda. Sehingga penulis berasumsi bahwa ada faktor lain yang dapat meningkatkan efektifitas/ keberhasilan suatu program.

Asumsi tersebut didukung pendapat Subarsono (2006:87), yang menyatakan bahwa "*Implementasi program melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran sehingga kondisi kelompok sasaran akan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan/*

program". Salah satu kondisi kelompok sasaran adalah kapasitas dasar masyarakat (World Bank, 2006 : 64), yang merupakan susunan sosio-demografis sosial pada penduduk, yakni aset dan karakteristik rumah tangga atau perorangan di dalam populasi. Peningkatan kapasitas dasar merupakan faktor utama yang mendukung pengurangan kemiskinan selama periode 1999-2002 (Word Bank, 2006 : 65).

Disamping faktor kapasitas dasar, partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting dan bahkan menentukan keberhasilan suatu program (Ginanjari Kartasasmita, 1995:10). Masyarakat berperan serta pada pembangunan pertanian atau pedesaan berarti mereka secara langsung terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok pembangunan yang mempengaruhi mereka (Casley dan Kumar, 1991: 187). Ilustrasi kegiatan partisipasi pembangunan pedesaan dikemukakan oleh John M. Cohen dan Norman Uphoff (1977) dalam Rija Sudirja (2007: 1) sebagai berikut:

"With regard to rural development, we saw "participation" including people's involvement in decision-making process about what would be done and how; their involvement in implementing programs and decision making by contributing various resources or cooperating in specific organizations or activities; their sharing in the benefits of development programs; together, these four kinds of involvement appeared to encompass most of what would

generally be referred to as "participation" in rural development activities".

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat yang dapat diukur melalui jumlah dan pertumbuhan organisasi/lembaga pemanfaat yang menunjukkan prakarsa dan mobilisasi sumberdaya lokal untuk upaya pembangunan khusus dan kontribusi terhadap efektifitas program dalam setiap tahapan, yaitu: tahap pengambilan keputusan (dalam perencanaan), implementasi (pelaksanaan), mendapatkan manfaat (*benefit*) dan evaluasi (*evaluation*) (Casley dan Kumar, 1991: 189-190).

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan/program, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung efektifitas Program Aksi Desa Mandiri Pangan dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu peranan *stakeholder*, kapasitas dasar masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1. Peranan Stakeholder

Peranan *stakeholder* diketahui dari :

- a. Pembagian tugas dan wewenang seluruh pihak yang terlibat serta mekanisme komunikasi dan koordinasi.
- b. Sumberdaya yang dikerahkan untuk pelaksanaan program, meliputi : sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan masyarakat dan *stakeholder*.

2.2.2. Kapasitas Dasar Masyarakat

Kapasitas dasar masyarakat dalam penelitian ini akan dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Karena tingkat pendidikan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraannya. Kondisi kapasitas dasar masyarakat dalam penelitian ini adalah tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sasaran yang diukur melalui :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Tingkat pendapatan

2.2.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diukur melalui kelembagaan yang dibentuk dengan adanya program dan bentuk partisipasi dalam setiap tahapan, yaitu : tahap pengambilan keputusan (dalam perencanaan), implementasi (pelaksanaan), mendapatkan manfaat (*benefit*) dan evaluasi (*evaluation*).

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian evaluasi kebijakan ini digunakan pendekatan evaluasi formal (*formal evaluation*) sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2003 : 613-614). Evaluasi formal, menurut Dunn adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan *administrator program*.

Penelitian evaluasi ini menggunakan desain "*single program before-after*" (Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa, 1994 : 74) karena untuk mengetahui perubahan kelompok sasaran dengan dilaksanakannya suatu program/kebijakan.

3.2. Lokasi Penelitian

Studi evaluasi ini akan dilakukan pada dua lokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan yakni Desa Muntuk Kecamatan Dlingo dan Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri pada seluruh tahapan. Pengambilan lokasi didasarkan pada keberadaan program di dua Desa tersebut merupakan *pilot project* penanggulangan rawan pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Dalam studi evaluasi ini, data ditampilkan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan informan terpilih yang terdiri dari pelaksana program dan perwakilan kelompok sasaran maupun informan kunci lainnya. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif adalah pedoman wawancara. Pendalaman secara kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan lebih mendalam dari pelaksanaan program.

Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, menggunakan instrumen daftar pertanyaan/kuesioner. Instrumen kuesioner

diadopsi dari model *Vectorial Project Analysis* Badan Ketahanan Pangan Pusat yang telah direkomendasikan untuk mengevaluasi kelompok sasaran program aksi Desa Mandiri Pangan.

Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mengambil 20 anggota sampel dari jumlah populasi 40 kepala keluarga untuk masing-masing desa. Pengambilan sampel ini juga didasarkan pada asumsi bahwa dalam penelitian kualitatif ukuran sampel diabaikan.

3.4. Teknik Analisis Data

Data hasil wawancara dilakukan pemilihan pada bagian-bagian informasi yang perlu dikode, yang perlu dibuang, dan pola-pola yang dianggap paling umum terjadi. Sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Untuk menguji kebenaran makna-makna yang muncul dari data dilakukan dengan melakukan tukar-pikiran di antara anggota masyarakat di lokasi penelitian. Sehingga diperoleh validitas data yang memadai.

Data hasil kuesioner dimasukkan ke dalam *file* berbentuk *MS Excell*. Dalam *file* ini disediakan 20 *worksheet* (SF-1 sampai dengan SF-20) sesuai dengan jumlah sampel yang diambil. Setiap *worksheet* akan digunakan untuk memasukkan data setiap responden (satu *worksheet* satu responden).

Hasil yang diperoleh dari *file* pada dasarnya adalah data yang menggambarkan indikator status ketahanan pangan kelompok tersebut sebelum program dan sesudah program berjalan.

3.5. Indikator Keberhasilan Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Dalam penelitian evaluasi implementasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ini, ingin diketahui keberhasilan pelaksanaan program, melalui indikator *output* dan *outcome*.

Output kebijakan menurut Dunn (2003 : 513) adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sedangkan *outcome* kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Indikator keluaran oleh Casley dan Kumar (1991: 176-178) diperjelas guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sasaran program, dengan mengukur indikator ekonomi dan indikator kualitas hidup. Indikator ekonomi dinilai dengan mengukur tingkat pendapatan masyarakat sedangkan indikator kualitas hidup dinilai dengan mengukur tingkat pendidikan, kesehatan.

Adapun rekapitulasi indikator evaluasi program ini dapat ditampilkan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Indikator Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kab.Bantul

Indikator	Penilaian indikator	Sasaran (target)	Alat pembukti indikator	Faktor Ketidakpastian
Output				
	Sosialisasi, Pendampingan dan Pelatihan masyarakat: jumlah KK miskin, kelompok tani dan pegawai instansi terkait yang mengikuti penyuluhan/ pendampingan, sosialisasi dan pelatihan.	Jumlah KK miskin, kelompok tani dan pegawai instansi terkait (Dinas Pertanian dan Kehutanan, Din Kes, BKK dan Instansi lain) meningkat pengetahuannya	Data sekunder Dan wawancara	
	Kelembagaan Pangan di desa : Kelompok afinitas, Tim Pangan Desa, dan Lembaga Keuangan Desa.	Jumlah KK miskin yang terlayani	Data sekunder dan wawancara	
	Bantuan berupa : Dana penguatan modal usaha ekonomi produktif untuk kelompok	Jumlah KK miskin yang mendapat bantuan berupa uang	Data sekunder dan wawancara	
Outcome				
	<p>Kemajuan tingkat penghidupan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Kesempatan kerja 3. Konsumsi pangan 4. Sanitasi dan kebersihan <p>Kemajuan Pola pikir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktifitas di kelompok 2. Adopsi teknologi 3. Kebiasaan menabung 4. Kepercayaan diri 5. Orientasi pendidikan anak 6. Pengarusutamaan gender 7. Orientasi usaha 	<p>peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan peningkatan konsumsi 3B.</p> <p>peningkatan pola pikir masyarakat sasaran</p>	<p>Kuesioner, Data sekunder, Wawancara.</p>	<p>Adanya kegiatan instansi lain atau LSM di lokasi yang sama dengan lokasi Desa Mapan dan masyarakat sasaran Desa mapan juga menjadi target sasarannya</p>

3.6. Kerangka Pikir

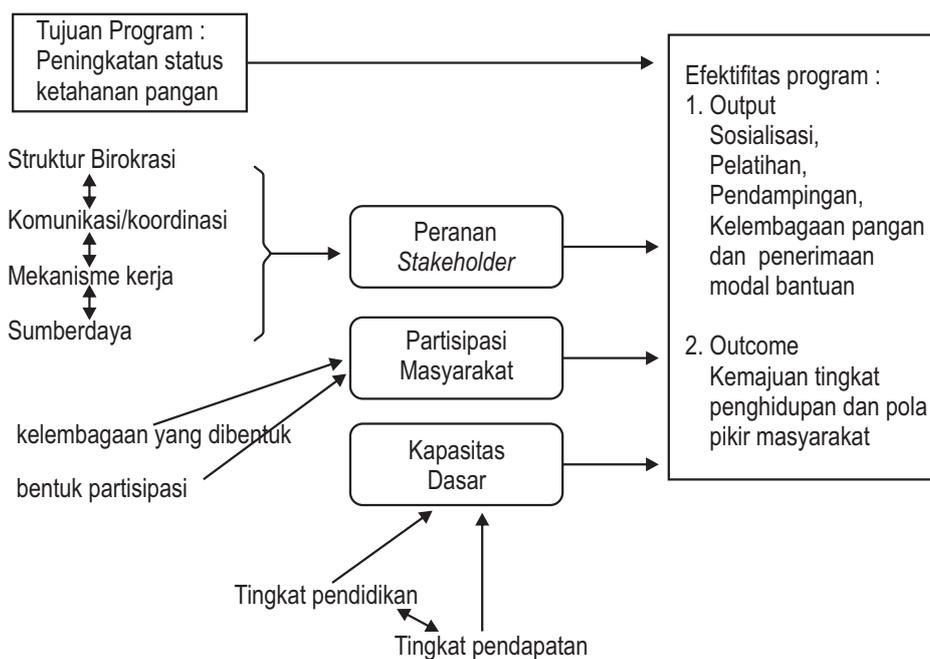
Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas program, sehingga disusun kerangka pikir penelitian sebagaimana dalam gambar 3.1 berikut ini:

3.7. Definisi Konsep dan Operasional

Definisi konsep dan operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

3.7.1. Efektifitas program adalah ketepatan hasil dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 3.1.
Kerangka pikir evaluasi implementasi program



Sumber: diadopsi dari pendapat Edward III (1980:148), Meter dan Horn (1975: 463), dan Weimer dan Vining (1999).

Indikator utama yang digunakan adalah:

a. *Output* Program Aksi Desa Mandiri Pangan meliputi :

Sosialisasi, Pelatihan Masyarakat, Pendampingan, Kelembagaan Pangan dan Penerimaan Bantuan.

b. *Outcome* Program Aksi Desa Mandiri Pangan meliputi :

1). Kemajuan tingkat kehidupan (*livelihood*) adalah kondisi yang menggambarkan kemajuan fisik status ketahanan pangan yang antara lain diukur melalui beberapa subindikator yaitu Pendapatan, Kesempatan kerja, Konsumsi pangan, Sanitasi dan kebersihan.

2). Kemajuan pola pikir (*mindset*) adalah kondisi yang menggambarkan kemajuan masyarakat diukur melalui aktifitas di kelompok tani, tingkat adopsi teknologi, kebiasaan menabung, kepercayaan diri, orientasi pendidikan anak, pengarusutamaan *gender*, dan praktek dan orientasi bisnis (usahatani).

3.7.2. Peranan Stakeholder

Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa. Peranan *stakeholder* untuk mendukung keberhasilan program diukur dengan indikator :

a. Pembagian tugas dan wewenang *stakeholder* terkait dan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang dilakukan.

b. Sumberdaya, yang diukur melalui sumberdaya manusia yang tersedia

dan sumberdaya keuangan dari *stakeholder* yang terliibat.

3.7.3. Kapasitas Dasar Masyarakat

Kapasitas dasar adalah susunan sosio-demografis sosial pada penduduk, yakni aset dan karakteristik rumah tangga atau perorangan di dalam populasi. Indikator kapasitas dasar masyarakat diukur dari :

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Tingkat Penghasilan

3.7.4. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan pada aspek keterlibatan dalam setiap aktifitas Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan, kontribusi yang diberikan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam tahap pengambilan keputusan (dalam perencanaan), implementasi (pelaksanaan), mendapatkan manfaat (*benefit*) dan evaluasi (*evaluation*).

Indikator partisipasi masyarakat dapat diukur dari :

- a. Kelembagaan yang dibentuk dengan adanya program.
- b. Bentuk partisipasi masyarakat.

4.1. Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Program Desa Mandiri Pangan dilakukan di desa rawan pangan yang memiliki karakteristik kualitas sumber daya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Berdasarkan analisis rawan pangan di Kabupaten Bantul pada tahun 2006 ditetapkan lokasi kegiatan Pengembangan Desa

Mandiri Pangan yaitu Desa Muntuk Kecamatan Dlingo dan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri, dengan alasan bahwa dua desa tersebut merupakan desa rawan pangan dan mempunyai kepala keluarga miskin lebih dari 30 %.

Pencapaian tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dirancang dalam kurun waktu empat tahun, melalui empat tahapan yang diharapkan mencapai kemandirian. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap penumbuhan, (3) tahap pengembangan dan (4) tahap kemandirian.

4.2. Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

4.2.1. Penetapan kelompok sasaran

Penentuan lokasi program didasarkan dari hasil analisis situasi rawan pangan, kemudian diidentifikasi ulang dengan melakukan survei yang disebut dengan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) untuk mengetahui jumlah kepala keluarga miskin di wilayah desa. Apabila diketahui desa rawan

pangan dengan minimal kepala keluarga miskin 30 persen dari seluruh penduduk desa, maka desa ini layak untuk mendapatkan Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan ini.

Sedangkan kelompok sasaran ditentukan melalui Survei Rumah Tangga miskin (SRT). Survei ini merupakan kelanjutan dari survei Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) untuk menetapkan 40 (empat puluh orang) kepala keluarga sebagai kelompok sasaran Program Desa Mandiri Pangan di masing-masing desa.

4.2.2. Sosialisasi

Sosialisasi program dilaksanakan dengan menggunakan forum Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Bupati Bantul selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Daerah untuk mendapatkan dukungan kegiatan Instansi lintas sektor.

4.2.3. Pelatihan Masyarakat

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan pelatihan dasar kepada : pendamping/pembina kemitraan, pa-

Tabel 4.1.
Komposisi KK miskin dan tidak miskin Desa Muntuk dan Selopamioro Th 2006

Uraian	Desa Muntuk	Desa Selopamioro
Jumlah KK	2181	3393
KK miskin	1629	1935
Prosentase KK miskin	74,69	57,02
KK tidak miskin	552	1458

Sumber : Data base Desa Muntuk dan Desa Selopamioro

mong desa, aparat tingkat kabupaten/kecamatan, petani/kelompok afinitas dan pengurus kelembagaan petani.

4.2.4. Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping untuk memberdayakan seluruh keluarga miskin yang berada di desa sasaran dan meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat termasuk kelembagaannya.

4.3. Input Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Dukungan APBN Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 450 juta, tahun anggaran 2007 sebesar Rp 530 juta, tahun anggaran 2008 Rp. 535 juta tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 757,4 juta.

Penanggung jawab program ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Ketahanan Pangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan 5 orang staf pelaksana, serta satu orang Bendahara kegiatan.

4.4. Perangkat Administrasi Proyek

Penerbitan surat-surat keputusan sebagai kelengkapan perangkat administrasi proyek untuk mengatur dan mendukung pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul.

4.5. Pemberian Bantuan

Dana bantuan permodalan merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok yang mengalami keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha produktif.

5.1. Pengantar

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis serta interpretasi atas hasil data primer, serta data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, data dari kelompok sasaran, data dari Desa Muntuk, data dari Desa Selopamioro, dan sebagainya. Untuk mengukur efektifitas program, dalam penelitian ini digunakan dua indikator yaitu *output* dan *outcome*.

5.2. Efektifitas Program

5.2.1. Output

Evaluasi *output* pada program aksi desa mandiri pangan meliputi penilaian atas pelaksanaan program di Kabupaten Bantul yang meliputi :

5.2.1.1. Sosialisasi

Program Aksi Desa Mandiri Pangan telah disosialisasikan di tingkat Kabupaten dan Desa melibatkan pelaku kebijakan dan *stakeholder* terkait. Sehingga dengan sosialisasi, informasi

kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan ini akan diketahui oleh masyarakat secara luas. Melalui kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten, program akan mendapatkan dukungan dari Instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan ini untuk bersama-sama mensukseskan program.

5.2.1.2 Pelatihan Masyarakat

Pelatihan masyarakat yang ditujukan oleh kelompok sasaran yang tergabung dalam kelompok afinitas telah dilaksanakan pada tiap tahapan program mulai pada tahap persiapan sampai tahap kemandirian dengan memperhatikan potensi wilayah dan sesuai kebutuhan anggota kelompok afinitas.

5.2.1.3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan program. Adapun ruang lingkup kegiatan pendampingan meliputi :

- 1) Pendampingan dalam rangka pengembangan dinamika kelompok, administrasi pembukuan dan manajemen keuangan kelompok, permodalan, manajemen usaha dan jaringan usaha terutama dilakukan pada tahap persiapan.
- 2) Pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas anggota kelompok dibidang pangan dan gizi, kesehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penerapan teknologi tepat guna pada tahap persiapan dan penumbuhan.
- 3) Pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan

usaha produktif kelompok baik *onfarm*, *off-farm* maupun *non-farm* termasuk menjalin kemitraan usaha untuk mendukung aspek pemasaran produk yang dihasilkan kelompok.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan telah dilaksanakan pada kelompok afinitas sesuai dengan rencana program, sehingga kelompok afinitas menjadi lebih berdaya dan meningkat kapasitas kelembagaannya.

5.2.1.4. Kelembagaan Pangan di Desa

Kelembagaan pangan di desa yang diharapkan terbentuk dengan adanya Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah kelompok afinitas, Tim Pangan Desa dan Lembaga Keuangan Desa.

Berdasarkan analisis dokumen keproyekan, LKD belum dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati atau dalam bentuk badan hukum. Sebagai lembaga pengelola keuangan, LKD harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan masyarakat tersebut, maka mereka tidak akan ragu dalam menanamkan modalnya/menabung pada lembaga tersebut.

5.2.1.5. Penerimaan Bantuan

Dana bantuan merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok dan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif dalam mendukung perwujudan ketahanan pangan di perdesaan (*on farm*, *off farm* dan *non farm*).

Semua kegiatan dikelola oleh kelompok dan penentuan penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok. Adapun jumlah dana bantuan sosial yang salurkan dari dana APBN untuk tiap desa adalah sebesar Rp 100 juta.

5.2.2. Outcome

Sebagaimana telah diuraikan mengenai indikator keberhasilan program, Program Aksi Desa Mandiri Pangan ini bertujuan meningkatkan status ketahanan secara holistik dan komprehensif yang tidak hanya meliputi peningkatan di bidang kesejahteraan (fisik) tetapi juga meliputi kemajuan kapasitas manusia yang ditunjukkan

melalui perkembangan pola pikir yang positif (nonfisik).

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan tingkat penghidupan dan pola pikir positif masyarakat sasaran. Namun, penulis perlu menganalisis 3 komponen tingkat penghidupan yakni perkembangan tingkat pendapatan, kesempatan kerja dan konsumsi pangan masyarakat. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan penambahan kesempatan kerja, akan mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 5.1
Pendapatan Keluarga, Pendapatan Perkapita, Garis kemiskinan
Dan Konsumsi Pangan di Desa Muntuk Kecamatan Dlingo

No.	Indikator	Tahun 2006*)	Tahun 2009**)	Pertumbuhan (+/-)
1.	Pendapatan keluarga rata-rata per tahun (Rp) :	3.655.7500,00	5.852.850,00	+
	a. On-farm (Rp/th)	526.500,00	981.500,00	+
	b. Off-farm (Rp/th)	2.175.882,00	2.766.235,00	+
	c. Non-farm (Rp/th)	2.057.333,00	2.766.235,00	+
	Pendapatan perkapita (Rp/th)	1.318.104,00	2.003.879,00	+
	Garis kemiskinan (Rp/th/kap)	1.280.000,00	1.600.000.00	Pendapatan perkapita diatas garis kemiskinan
2.	Konsumsi pangan :			
	Asupan kalori (kal/hari/kap)	1.637	1.963	+
	Asupan protein (gr/hari/kap)	35	43	+

Sumber : analisis data kuesioner
Ket : *) sebelum program
**) saat dilakukan penelitian

Tabel 5.2
Persentase Responden di Desa Muntuk Kecamatan Dlingo
Menurut Indikator Outcome

No.	Indikator	Tahun 2006*)	Tahun 2009**)	Pertumbuhan (+/-)
1.	Kesempatan kerja : Sumber pendapatan > 1	20 %	95 %	+
2.	Sanitasi kebersihan : Sumur terlindung MCK sendiri Jenis lantai (semen)	30 % 50 % 25 %	65 % 65 % 60 %	+ + +
3.	Aktifitas di kelompok : Aktif hadir di pertemuan Paham visi misi kelompok Terlibat aktif Tahu kondisi keuangan kelompok	25 % 15 % 20 % 20 %	55 % 45 % 95 % 30 %	+ + + +
4.	Tingkat adopsi teknologi : Sering hadir di pelatihan Sumber tekn dari penyuluh	15 % 15 %	60 % 55 %	+ +
5.	Kebiasaan menabung : Menabung setiap panen	15 %	100 %	+
6.	Kepercayaan diri : Keberanian berpendapat	20 %	80 %	+
7.	Orientasi pendidikan anak : SMA-Sarjana	85 %	95 %	+
8.	Pengarusutamaan jender : Aktif di kelompok Memiliki aktifitas produktif	25 % 10 %	60 % 45 %	+ +
9.	Orientasi bisnis : Akses dana melalui kelompok Motivasi produksi	10 % 55 %	85 % 100 %	+ +

Sumber : analisis data kuesioner

Ket : *) sebelum program

***) saat dilakukan penelitian

Tabel 5.3
Pendapatan Keluarga, Pendapatan Perkapita, Garis kemiskinan
Dan Konsumsi Pangan di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri

No.	Indikator	Tahun 2006*)	Tahun 2009**)	Pertumbuhan (+/-)
1.	Pendapatan keluarga rata-rata per tahun (Rp) :	1.930.250,00	2.675.750,00	+
	a. On-farm (Rp/th)	922.500,00	1.273.056,00	+
	b. Off-farm (Rp/th)	1.360.000,00	2.120.000,00	+
	c. Non-farm (Rp/th)	950.000,00	1.250.000,00	+
	Pendapatan perkapita (Rp/th)	525.267,00	739.233,00	+
	Garis kemiskinan (Rp/th/kap)	1.280.000,00	1.600.000,00	Pendapatan perkapita dibawah garis kemiskinan
2.	Konsumsi pangan :			
	Asupan kalori (kal/hari/kap)	1.855	2.089	+
	Asupan protein (gr/hari/kap)	36	41	+

Sumber : analisis data kuesioner

Ket : *) sebelum program

***) saat dilakukan penelitian

Tabel 5.4
Persentase Responden di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri
Menurut Indikator Outcome

No.	Indikator	Tahun 2006*)	Tahun 2009**)	Pertumbuhan (+/-)
1.	Kesempatan kerja : Sumber pendapatan > 1	30 %	90 %	+
2.	Sanitasi kebersihan :			
	Sumur terlindung	75 %	85 %	+
	MCK sendiri	90 %	100 %	+
	Jenis lantai (keramik)	10 %	40 %	+
3.	Aktifitas di kelompok :			
	Aktif hadir di pertemuan	60 %	100 %	+
	Paham visi misi kelompok	15 %	80 %	+
	Terlibat aktif	55 %	100 %	+
	Tahu kondisi keuangan kelompok	10 %	85 %	+

Tabel 5.4
 Persentase Responden di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri
 Menurut Indikator Outcome

No.	Indikator	Tahun 2006*)	Tahun 2009**)	Pertumbuhan (+/-)
4.	Tingkat adopsi teknologi :			
	Sering hadir di pelatihan	85 %	100 %	+
	Sumber tekn dari penyuluh	20 %	100 %	+
5.	Kebiasaan menabung :			
	Setiap panen	40 %	100 %	+
6.	Kepercayaan diri :			
	Keberanian berpendapat	5 %	60 %	+
7.	Orientasi pendidikan anak :			
	SMA-Sarjana	75 %	90 %	+
8.	Pengarusutamaan jender :			
	Aktif di kelompok	5 %	35 %	+
	Memiliki aktifitas produktif	20 %	60 %	+
9.	Orientasi bisnis :			
	Akses dana melalui kelompok	20 %	100 %	+
	Motivasi produksi	65 %	100 %	+

Sumber : analisis data kuesioner

Ket : *) sebelum program

**) saat dilakukan penelitian

Desa Muntuk

Peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Muntuk mencapai 60,10%, dengan peningkatan tertinggi di bidang *onfarm* 86,42%, *off-farm* 62,70 % dan *non-farm* 34,55%. Hal ini diakibatkan adanya kenaikan kesempatan kerja (sumber penghasilan) yang mencapai 159,38%. Artinya, dalam masyarakat telah terjadi peningkatan sumber penghasilan. Sebelum program hanya ada satu sumber penghasilan, setelah program berjalan sebagian memiliki 2 atau lebih sumber penghasilan.

Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat telah berhasil meningkatkan konsumsi pangan

masyarakat yang tercermin pada asupan kalori perkapita perhari meningkat 19,91% menjadi 1963 kkal/kap/hari. Sedangkan asupan protein meningkat 23,20% menjadi 43 gr/kap/hari. Namun konsumsi pangan masyarakat Desa Muntuk tersebut masih dibawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan yakni 2000 kkal/kap/hari untuk karbohidrat dan 52 gr/kap/hari untuk protein.

Desa Selopamioro

Peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Selopamioro mencapai 38,62%, dengan peningkatan tertinggi di bidang *off-farm* 55,88%, *on-farm* 38,00 % dan *non-farm* 31,58%. Hal ini

diakibatkan adanya kenaikan kesempatan kerja (sumber penghasilan) yang mencapai 94,74%. Artinya, dalam masyarakat telah terjadi peningkatan sumber penghasilan sebelum program yang hanya memiliki satu sumber penghasilan, setelah program berjalan sebagian memiliki 2 sumber penghasilan.

Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat telah berhasil meningkatkan konsumsi pangan masyarakat sehingga asupan kalori perkapita perhari meningkat menjadi 2089 kkal/kap/hari (12,61%). Sedangkan asupan protein meningkat menjadi 41 gr/kap/hari (11,61%). Konsumsi karbohidrat telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan yakni 2000 kkal/kap/hari, sedangkan untuk konsumsi protein masih dibawah 52 gr/kap/hari.

Berdasarkan analisis indikator *output* maupun *outcome*, program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pelaksanaan program secara umum dikatakan efektif meskipun belum dapat mengentaskan kemiskinan peserta program.

6.1. Peranan Stakeholder

Program Aksi Desa Mandiri Pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing lembaga (Badan

Ketahanan Pangan, 2009:15), ditentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

Berdasarkan hasil analisis diatas disimpulkan bahwa peranan *stakeholder* meliputi pembagian tugas dan wewenang, mekanisme koordinasi dan komunikasi *stakeholder* dan dukungan sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan merupakan faktor yang harus ada bagi keberhasilan suatu program.

6.2. Kapasitas Dasar Masyarakat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, masyarakat desa Muntuk memiliki kapasitas dasar yang lebih tinggi, hal ini diketahui dari tingkat pendidikan penduduk dan tingkat pendapatan awal (sebelum program) lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa Selopamioro.

Berdasarkan data survei rumah tangga Desa Muntuk dan Desa Selopamioro dari 40 kepala keluarga miskin diperoleh informasi yang menggambarkan status pendidikan anggota rumah tangga mereka, Status pendidikan di Muntuk diketahui sebanyak 57,1 % atau 95 orang tidak sekolah. Sedangkan di Selopamioro diketahui tidak sekolah sebanyak 68.9 % yaitu 131 orang.

Adanya perbedaan kapasitas dasar kelompok sasaran tersebut, akan mengakibatkan *outcome* yang berbeda pula. Sudah barang tentu kelompok sasaran yang mempunyai kapasitas dasar lebih tinggi akan menghasilkan *outcome* program yang lebih bagus pula. Hal ini terbukti pada peningkatan pendapatan yang terjadi pada kelompok sasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, jumlah pendapatan per tahun untuk Kelompok Mandiri Pangan Desa Muntuk sebelum program antara Rp. 1.550.000,00 – Rp. 6.200.000,00. Pada saat penelitian dilakukan (tahun 2009), jumlah pendapatan meningkat menjadi Rp.2.057.000,00 – Rp. 9.400.000,00, dengan pendapatan perkapita rata-rata Rp.2.003.879,00.

Sedangkan data yang diperoleh dari Kelompok Mandiri Pangan Desa Selopamiro sebelum program jumlah pendapat berkisar antara Rp.800.000,00 – Rp.2.900.000,00. Pada tahun 2009, saat dilakukan penelitian jumlah pendapatan berkisar antara Rp.900.000,00 - Rp.3.700.000,00, dengan pendapatan perkapita rata-rata Rp.739.233,00.

Keadaan demikian semakin memperjelas bahwa kapasitas dasar masyarakat sangat menentukan tingkat keberhasilan program, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas dasar (*endowment factor*) merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan suatu program.

6.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan pada aspek keterlibatan dalam setiap aktifitas Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan, kontribusi yang diberikan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam setiap tahap kegiatan. Indikator partisipasi masyarakat diukur melalui :

6.3.1. Jenis Lembaga yang dibentuk dengan adanya program

Salah satu *output* program Aksi Desa Mandiri Pangan ini adalah penumbuhan kelembagaan di desa sasaran. Adapun jenis kelembagaan yang telah dibentuk menurut informasi dari Pejabat Pembuat Komitmen program ini adalah :

a. Kelompok Afinitas

Kelompok afinitas mandiri pangan yang terdapat di desa Muntuk dibentuk secara partisipatif pada tanggal 10 September 2006 dengan anggota kepala keluarga miskin yang diambil dari hasil survei data dasar rumah tangga bulan Maret 2006. Kelompok ini dinamakan Kelompok Mandiri Pangan Muntuk Lestari dengan anggota 40 orang dan sampai tahun 2009 telah berjumlah 151 orang. Kelompok Mandiri Pangan ini mengadakan pertemuan setiap bulan pada tanggal 10.

Dalam tubuh Kelompok Mandiri Pangan Muntuk Lestari terdiri dari 5 sub kelompok antara lain : Kelompok Ternak Lele/Ikan, Kelompok Tempe, Kelompok Peternakan. Kelompok Kerajinan dan mebel, serta Kelompok Pengolahan hasil pertanian.

Sedangkan pada kelompok mandiri pangan yang ada di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri berdiri sejak tanggal 14 September 2006 dan dinamakan Kelompok Mandiri Pangan Selomulyo dengan jumlah anggota pada awal pembentukan berjumlah 40 orang dan sampai tahun 2009 ini telah mencapai 116 orang. Kelompok ini mengadakan pertemuan rutin pada tanggal 14 setiap bulannya.

Seperti halnya dengan KMP Muntuk Lestari, KMP Selomulyo ini terdiri dari 3 (tiga) sub kelompok yang bergerak dalam bidang pertanian maupun nonpertanian. Bidang usaha yang dominan di KMP desa Selopamioro ini adalah peternakan kambing.

b. Tim Pangan Desa

Tim Pangan Desa telah dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 40 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Kerja Desa Mandiri Pangan serta Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul. Keanggotaan tim pangan desa diketuai oleh lurah desa dibantu kaur ekonomi pembangunan desa sebagai sekretaris dengan anggota tokoh masyarakat 1 orang, perwakilan KK miskin 2 orang dan Penggerak PKK Desa 1 orang.

Tim pangan desa bersama-sama tenaga pendamping membimbing kelompok afinitas yang terbentuk dalam hal perbaikan administrasi kelompok (tertib administrasi) dan bimbingan peningkatan usaha. Serta memberikan motivasi agar anggota kelompok mau aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok.

c. Lembaga Keuangan Desa

Lembaga Keuangan Desa dibentuk di kedua desa lokasi Program dalam rangka mendukung pengelolaan permodalan. LKD desa Muntuk dibentuk pada tanggal 10 Februari 2007, dan telah mempunyai AD/ART dan sistem administrasi yang terpisah dari KMP Muntuk Lestari. Sedangkan LKD desa Selopamioro dibentuk pada tanggal 14 Maret

2007. Kepengurusan LKD adalah perwakilan dari kelompok afinitas yang ditetapkan secara musyawarah dengan rasa jujur, transparan dan mampu mengelola keuangan dengan baik.

Sejak terbentuknya LKD Muntuk melayani 40 orang anggota kelompok afinitas yang sampai tahun 2009 ini telah berjumlah 151 orang. Sementara LKD Selopamioro telah melayani kegiatan simpan pinjam pada anggota kelompok afinitas yang semula berjumlah 40 orang dan pada tahun 2009 telah mencapai 116 orang.

6.3.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Aksi Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan di Desa Muntuk Kecamatan Dlingo dan Desa Selopamioro Imogiri, dapat digolongkan menjadi :

1. Partisipasi dalam bentuk sumbang pemikiran, bentuk partisipasi ini dilakukan dalam berbagai pertemuan kelompok ataupun dalam tahap perencanaan kegiatan.
2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan biaya/uang yang digunakan dalam pelaksanaan program.
3. Partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Muntuk menghasilkan program yang lebih baik, jika dibandingkan yang terjadi di Desa Selopamioro.

Dengan demikian bentuk partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektifitas program.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, program ini merupakan program *topdown* dari pemerintah yang dilaksanakan di kabupaten, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa terlepas dari keterkaitan dengan instansi di atasnya maupun dengan instansi sejajar. Dengan demikian peranan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilan program.

Berdasarkan analisis faktor-faktor diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat meningkatkan efektifitas/keberhasilan pelaksanaan program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul adalah faktor kapasitas dasar masyarakat dan partisipasi masyarakat.

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Bantul yang dilaksanakan di Desa Muntuk Dlingo dan Desa Selopamiro Imogiri efektif karena telah sesuai dengan rencana program, dengan kata lain prestasi yang telah dicapai telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi terhadap *stakeholder* telah terlaksana di tingkat Kabupaten, sedangkan sosialisasi terhadap anggota kelompok sasaran telah dilaksanakan di tingkat desa.
3. Pendampingan telah dilakukan pada kelompok sasaran pada setiap

tahapan program, mulai tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan tahap kemandirian.

4. Pelatihan masyarakat telah dilaksanakan pada setiap tahapan program. Jenis pelatihan maupun materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok sasaran dan kapasitas lokal tiap desa.
5. Kelembagaan pangan telah terbentuk berdasarkan hasil partisipasi masyarakat berupa Kelompok Afinitas, Tim Pangan Desa dan Lembaga Keuangan Desa. Namun untuk Lembaga Keuangan Desa belum ada surat keputusan sebagai dasar kekuatan hukum.
6. Adanya bantuan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok afinitas, telah berhasil mendorong dan memberdayakan masyarakat sasaran sehingga membuka kesempatan kerja baru dan menggerakkan kegiatan ekonomi yang dapat menopang kebutuhan rumah tangganya.
7. Hipotesis diterima karena program telah berhasil meningkatkan tingkat penghidupan dan kemajuan pola pikir masyarakat sasaran. Namun program belum dapat secara efektif menurunkan angka kerawanan pangan yang diindikasikan belum terangkatnya masyarakat sasaran dari garis kemiskinan.
8. Kemajuan tingkat penghidupan dan pola pikir masyarakat sasaran program sangat ditentukan oleh peranan *stakeholder*. Sedangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program

adalah kapasitas dasar masyarakat dan partisipasi masyarakat.

1.2. Saran

Saran yang diajukan berdasarkan hasil evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan pada Desa Muntuk Kecamatan Dlingo dan Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri, adalah :

1. Lembaga Keuangan Desa sebagai lembaga pengelola keuangan di desa perlu dikukuhkan dengan bentuk badan hukum, agar dapat menjamin keberlangsungan program.
2. Bantuan usaha ekonomi produktif sebaiknya diarahkan dan diprioritaskan untuk jenis usaha produktif yang cepat pengembalian modalnya. Dengan perputaran modal yang cepat, diharapkan semakin banyak masyarakat sasaran yang menerima manfaat program. Pada akhirnya akan terjadi pertumbuhan perekonomian di desa dan dapat segera mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Aswatini, Haning Romdiati, Bayu Setiawan, Ade Latifa, Fitranita, Mita Noveria., 2004. *Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Sosial Demografi Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan, 2006., *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan*, Departemen Pertanian RI.
- Badan Ketahanan Pangan, 2007, *Pedoman Umum Kerawanan Pangan*, Departemen Pertanian RI
- Badan Ketahanan Pangan, 2007, *Pedoman Operasional Desa Mandiri Pangan*, Departemen Pertanian RI.
- Badan Ketahanan Pangan, 2007., *Petunjuk Evaluasi Program Desa Mandiri Pangan*, Departemen Pertanian RI
- Badan Ketahanan Pangan, 2009., *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan*, Departemen Pertanian RI
- Casley, Dennis J dan Krishna Kumar. 1991, *Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian*, Universitas Indonesia Press.
- Darwin, Muhadjir., 1996, *Dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pertanian RI, 2005. *Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Deptan.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ginanjart Kartasasmita. 1995., *Pembangunan Menuju Bangsa Yang Mandiri .Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi Dalam Pembangunan*. Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada.

http://www.nationalserviceresources.org/files/legacy/filemanager/download/performanceMeasurement/AC_PM_TOOLKIT_20060823.pdf diakses tanggal 17 Juni 2009

Husodo, Siswono Yudho, *Membangun kemandirian di Bidang Pangan: Suatu Kebutuhan bagi Indonesia*, Artikel Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun II nomor 6, September 2003.

Keban, Yeremias T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.

Miles dan Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Moloeng, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

Nainggolan, Kaman., 2008., *Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan dan Harga Komoditas Pangan*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 6 No. 2, Juni.

Osborne, David, Ted Gaebler., 1996., *Mewirauahakan Birokrasi*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Parson, Wayne. 2008, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Kencana*, Jakarta, Cetakan ketiga.

Ripley, Randall B., 1985, *Political Analysis in Political Science*, Nelson Hall Inc, Chicago.

Simatupang, Pantjar, 2007., *Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1989., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Subarsono, AG. 2006., *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Kedua.

Sudirja, Rija, 2007, *Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Program Pertanian di Pedesaan*, Depnakertrans RI.

Suryana, Achmad, 2005. *Ketahanan Pangan Nasional* .,Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Ketahanan dan Keamanan Pangan pada Era Otonomi dan Globalisasi, Faperta, IPB, Bogor, 22 November 2005

Wibawa, Samodra. 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo Agus Pramusinto. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winarno, Budi. 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, Cetakan Ketiga.

World Bank, 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. PT. Grha Info Kreasi.